

MENUJU DESA KOMUNIKATIF MELALUI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

Ade Chandra

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Jalan Timoho 317
Yogyakarta, 515989
Email: nurani_adechandra@yahoo.co.id

ABSTRAK

Masyarakat pedesaan saat ini menghadapi serbuan informasi akibat kemajuan teknologi komunikasi di tengah upaya mencapai kesejahteraan. Tak sedikit program yang dilakukan, Tetapi masyarakat masih belum menjadi lebih kuat. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai metamorfosis dari era *developmentalis* bisa menjadi pranata sosial dengan mengusung pengetahuan, nilai, dan ideologi desa. Tulisan ini ingin melihat sejauh mana peran KIM dalam pemberdayaan masyarakat di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta, mulai dari sosialisasi KIM oleh instansi terkait, pengorganisasian, dan cara kerja KIM yang mampu menjadi ruang komunikasi sosial bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui FGD tokoh masyarakat dan pengurus KIM, wawancara, dan dokumentasi. KIM di Depok, Sleman, Yogyakarta. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan KIM masih sebatas program teknis "proyek" yang dirumuskan dari supra desa yang tak sesuai dengan denyut nadi warga. Ruang KIM belum ditempatkan pada upaya mengkonsolidasikan kepentingan dan potensi lokal desa, menjadi jembatan transformasi kolektif dengan sasaran utama kemakmuran masyarakat desa berdasarkan potensi sosial budaya dan lingkungan setempat. Desa Komunikatif melalui KIM berarti membangun desa dari "belakang" dengan denyut menyuntikkan informasi relevan dengan permasalahan warga, saling mendiskusikan solusi alternatifnya, kemudian menyelenggarakan agenda tindak lanjut melalui kerja sosial kelembagaan yang kuat dan semangat budaya secara kolektif desa.

Kata kunci: *KIM, Komunikasi Sosial, dan kendala kelembagaan*

ABSTRACT

Rural communities are currently facing a rush of information due to advances in communication technology in the midst of efforts to achieve prosperity. Not a few programs are carried out. But society is still not getting stronger. The Community Information Group (CIG) as a metamorphosis from the developmental era can become a social institution by bringing knowledge, values, and village ideology. This paper wants to see the extent of the role of KIM in community empowerment in Kapanewon Depok, Sleman Regency, Yogyakarta Province, starting from the socialization of CIG by relevant agencies, organizing, and how CIG works which is able to become a social communication space for the community. The research method used is descriptive qualitative. Data was collected through FGDs of community leaders and KIM administrators, interviews and documentation. CIG in Depok, Sleman, Yogyakarta. Field findings show that KIM empowerment is still only a technical program "project" formulated from the supra-village which is not in accordance with the pulse of the residents. The CIG space has not been placed in an effort to consolidate the interests and local potential of the village, to become a bridge for collective transformation with the main goal of the prosperity of the village community based on the socio-cultural potential and the local

environment. Communicative Village through CIG means building a village from the "back" by injecting information relevant to the residents' problems, discussing alternative solutions with each other, then organizing a follow-up agenda through strong institutional social work and the collective spirit of village culture.

Key word: *KIM, Social Communications, and institutional constraints*

PENDAHULUAN

Informasi dan Teknologi kini telah menjadi bagian penting menghiasi dinamika masyarakat, tak terkecuali masyarakat desa. Sebagian kalangan menyebutnya sebagai era keterbukaan yang menyediakan peluang juga tantangan. Informasi membawa berbagai jenis pengetahuan yang luas. Di dalamnya terdapat nilai dan ideologi yang menuntun pada cara pandang baru yang lebih efektif dan produktif. Pada sisi lain, secara bersamaan, informasi terasa memberi guncangan atau tekanan kuat terhadap pola lama eksistensi masyarakat yang telah terbangun lintas generasi dan terinternalisasi sangat kuat. Akibatnya informasi gagal dilihat sebagai komoditas penting dalam menyusun aksi strategis dalam memajukan kehidupan bersama.

Era keterbukaan informasi tak lepas dari perkembangan teknologi komunikasi yang menjadikan dunia seakan tanpa ada batas jarak dan waktu. Pada konteks Indonesia misalnya, kita melihat telah terjadi perubahan berupa pergeseran masyarakat dari pola agraris yang lompat ke masyarakat informasi. Salah satu bukti fenomena itu kita dengan mudah melihat hampir semua warga dewasa punya HP, bahkan anak-anak. Implikasi pun sangat terasa pada perubahan perilaku individu hingga ke sistem sosial kemasyarakatan.

Serangan informasi dan pasar teknologi kini telah menjadikan Desa sebagai target empuk. Terlebih lagi pembangunan masyarakat desa melalui regulasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa masih sebatas pertengahan "proyek" yang belum menjadikan orang desa sebagai subjek atas masa depannya. Ideologi membangun desa dengan data masih jauh jika dibanding hiruk-pikuk pertengahan pengelolaan uang dari pusat yang masuk ke desa. Jakarta tampak sekali terlalu campur tangan atas desa. Sehingga desa tetap saja menjadi arena "proyek". Pembangunan desa masih dominan fisik, BUMDes dibangun secara latah, kesejahteraan masyarakat diwakili oleh gaji perangkat desa, atau dilihat dari tidak adanya *stunting*, dst. Ironis memang, pada usianya yang masih belia, kementerian desa ternyata belum mampu memberikan tendangan pembangunan yang tertuju pada adil dan makmur. Harusnya pemerintah pusat dan daerah cukup memberi pelayanan, perlindungan, mendorong partisipasi warga desa agar tumbuh prakarsa, inisiatif dan tanggungjawab desa atas dirinya dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi lokal desa serta masyarakat setempat.

Penyaluran aspirasi dan kepentingan lokal warga desa menyangkut nasibnya sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08 tahun 2010 yang berisi panduan untuk mengembangkan dan memberdayakan institusi komunikasi masyarakat, tanggal 1 Juni 2010, diantaranya mengatur terbentuknya ruang bagi komunikasi antar warga, yang kemudian disebut Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk secara murni berdasarkan kepentingan, kemampuan dan dilakukan dengan cara sesuai keadaan sosial guna menyalurkan aspirasi dan sekaligus ruang kreatif mengelola informasi dan memberkuasakan masyarakat agar tumbuh menjadi produktif (Undang-Undang RI No.8, 2010).

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memainkan fungsi strategis dalam rangka merespons tantangan kemakmuran masyarakat di desa, sebab KIM sebagai komunitas

masyarakat informasi yang tumbuh dan berkembang sesuai denyut nadi sosial-budaya lokal. KIM juga sebagai cara mengatasi kesenjangan akibat bentangan geografis dan teknis.

Realitas kehidupan bersama secara sosial warga di masyarakat kini menjadi isu penting dinamika sosial masyarakat. Bergerak bersama-sama dengan warga merupakan tindakan terorganisir memberi arah yang lebih tajam dan efektif pada pencapaian sasaran pemenuhan kepentingan banyak warga yang terus menerus meningkat kuantitas dan kualitasnya. Pengalaman masa lalu memberi referensi penting agar warga makin cepat dan dekat dengan cita-cita kemakmuran dalam lingkup bersama secara merata.

Sebenarnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat ditemukan melalui pengelompokan warga ketika rezim pembangunan nasional sebelum Indonesia masuk pada era reformasi. Grup warga yang dimaksud yaitu Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompencapir). Namun KIM lebih disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan orientasi kemajuan era sekarang. Demokratisasi hadir menjadi ruh baru penataan babak baru dalam adab sosial masyarakat seantero negeri. Bahkan sebagian besar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memulai pertumbuhan dari bawah, alami oleh, dari dan untuk masyarakat. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) juga bukanlah suatu organisasi massa, di beberapa wilayah, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan kumpulan organisasi pembinaan masyarakat yang telah ada misalnya PKK, Karang Taruna, pengrajin dan sebagainya.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat dibentuk dari kelompok yang dibentuk sebagai KIM atau Kelompok lain seperti kelompok tani, nelayan, UKM, atau yang lainnya yang berfungsi juga sebagai KIM. Tujuan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dibentuk untuk :

1. Menemukan masalah bersama melalui diskusi dengan anggota kelompok.
2. Mengenali cara pemecahan masalah.
3. Membuat keputusan bersama.
4. Melaksanakan keputusan dengan kerjasama
5. Mengembangkan jaringan informasi buat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

Menurut Literatur Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial definisi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam aktivitasnya KIM melakukan pengelolaan informasi, yang terdiri atas beberapa komponen yaitu :

1. Akses Informasi

Akses informasi dimaksudkan untuk pintu masuk pertama bagi warga dalam memastikan daftar kebutuhan prioritas warga, lalu mengelaborasinya sebagai amunisi solusi dengan berpijak pada pengumpulan informasi relevan sesuai pibidangan atau klaster persoalan, serta mendokumentasikannya. Informasi dikumpulkan sebanyak mungkin yang terkait dengan kepentingan bersama, baik yang dialami individu dalam lingkup terbatas maupun yang dialami oleh kolektivitas sebagian besar warga secara luas. Akses penting pada berbagai sumber dan jenis informasi tidak hanya pada keperluan jangka pendek saat ini tetapi juga penting pemandu generasi sosial warga di masa mendatang. Akses dilakukan bisa oleh masing-masing anggota secara pribadi di rumah masing-masing, atau diselenggarakan lakukan secara bersama-sama di salah satu anggota KIM atau di ruang spesifik KIM sebagai pangkalan operasi sosial perkumpulan warga pegiat KIM.

2. Diskusi Informasi

Diskusi digelar dengan maksud menata daftar masalah, mengambil bagian inti dari masalah tersebut, kemudian mengeksplorasi secara runtut segala temuan dan

tindakan yang dipandang perlu ditindaklanjuti dari substansi informasi. Berdiskusi berarti pegiat KIM sedang menempuh jalan terang guna menguari banyak kemungkinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagian mana dari informasi yang dikumpulkan dapat dikonstruksi lebih kuat lagi untuk disalurkan atau dipraktekkan, atau memfilter jenis materi pemicu munculnya persoalan di koletivitas warga sehingga mendesak untuk dicarikan jalan damainya atau tak lebih sekedar bertukar informasi untuk wawasan dan pencerahan baru pelaku KIM.
 - b. Sejauhmana informasi tersedia memadai untuk dikonstruksikan, adakah bagian yang terlewatkan yang luput dari perhatian, dan penting diukur dengan pembandingan informasi dari sumber yang berbeda.
 - c. Radius informasi yang telah diperoleh apakah dapat langsung direkonstruksikan dengan pokok isu yang terbentang di depan mata, tidak kah perlu kiranya merangkul bantuan kelompok lain dalam implementasi dan memperkaya imajinasi yang lebih lengkap.
3. Keadaan sosial dimana perlu kerjasama semua pihak di sekitar subjek masalah bisakah diterapkan gagasan yang terkandung di dalam materi informasi yang telah dikumpulkan tadi.
4. Implementasi

Implementasi pada hakekatnya adalah praktek peragaan informasi, menuangkan menjadi kegiatan nyata, terus menerus dipantau, lalu memperoleh pelajaran berharga menjadi agenda tindak lanjut. Babak baru ini dilakukan setelah pada fase sebelumnya diperoleh pesan berharga untuk mengoptimalkan pengetahuan atau informasi.

Praktik nyata dapat ditempuh oleh orang pegiat KIM atau secara serempak dengan pembedangan tertentu, tak terkecuali jalur usaha yang dapat mengangkat manfaat lebih besar pencapaian keuntungan. Mendayagunakan informasi berarti membuka ruang alternatif baru bagi kemungkinan hasil optimal, baik kesadaran jiwa individu yang berdampak pada koletivitas warga maupun pencapaian kemakmuran yang merata secara sosial.

5. *Networking*

Networking merupakan upaya menjalin hubungan dengan lembaga formal (pemerintah, perbankan, DPRD dan swasta) maupun informal (asosiasi profesi, LSM, media komunitas dan kelompok lain). Ikatan antar elemen institusi KIM dapat dimaknai sebagai relasi pegiat KIM secara internal atau ikatan pegiat KIM yang tertata dalam ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman bertukar gagasan. Jalinan ikatan seperti ini memungkinkan pegiat mendekati kenyataan atas tantangan terjal menembus hambatan individual yang bertransformasi menjadi kerja-kerja ekspansionis kerjasama lintas pegiat sosial yang makin meluas.

6. Diseminasi

Diseminasi yaitu menyebarluaskan informasi dengan didukung sejumlah ketrampilan. Penyebarluasan pesan dipraktekkan dengan syarat bahwa pesan telah dilengkapi, direkonstruksi, dan dipastikan adaptif terhadap kepentingan warga sekitar. Menariknya pada tahap diseminasi pesan juga ditandai prakondisi terkait babakan sebelumnya yang berhasil dilewati ketika pesan tadi disaring. Pada fase ini ingin digambarkan tidak hanya pada pesan yang siap saji saja, melainkan pada pengalaman proses yang telah ditempuh dengan cermat.

7. Aspirasi

Aktivitas KIM tak berhenti sekedar menyebarkan pesan dan data belaka namun juga pada penghargaan tinggi terhadap aspirasi yang sering disebut kepentingan warga komunitas. Ada banyak corak ragam aspirasi warga yang selalu berurusan

dengan *stakeholders* lainnya, baik insitusi pelayanan maupun jasa. Pada titik ini maka institusi KIM bisa menjadi jembatan distribusi dan penumbuhan informasi multi arah pada banyak pihak.

Data kemeninfo tahun 2009 mencatat setidaknya telah terbentuk 5569 KIM di seluruh Indonesia. Jika jumlah keseluruhan desa sekitar 72.400 maka lebih dari 70 persen telah ada KIM di tiap desa seluruh Indonesia. Pertanyaannya adalah mengapa kondisi masyarakat desa belum makmur dan belum berkuasa atas pemberdayaan yg telah dilakukan. Warga desa belum berdaulat atas diri meski memiliki segenap potensi sosial-budaya dan alam.

Penelitian oleh Faris dan Siti Musyaroh di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan tentang Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sebagai Sumber Informasi Potensi Lokal Dan Kearifan Budaya Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa KIM pasuruan kurang berperan sebagai sumber informasi potensi lokal dan kearifan budaya Kabupaten Pasuruan sehingga program pengadaan KIM ini hanya berjalan pada daerah-daerah yang mampu mengangkat potensi lokal dan budaya kearifan setempat, sedangkan daerah yang memiliki potensi lokal dan budaya kearifan tapi tidak memiliki sumber daya manusia dan sarana penunjangnya hanya sekedar mengikuti program pemerintah tapi berikutnya tidak ada pengembangan yang berarti.

<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE/article/download/817/671/>
Sedangkan Kasiatik dan Irwan Nasution menemukan Peranan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Deli Serdang memperlihatkan bahwa KIM dapat menjamin keberlangsungan hidup manusia menjadi tahu betapa pentingnya mengakses informasi di kehidupan sehari-hari di Desa Pasar V Kebun Kelapa, tetapi dalam mencapai tujuan tersebut, tentu banyak hambatan yang timbul dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, diantaranya seperti masalah pelaksanaan tugas KIM yaitu mengakses informasi untuk masyarakat desa Pasar V Kebun Kelapa, fasilitas infrastuktur penunjang kegiatan KIM, dan sampai kurangnya koordinasi di lapangan dan tidak adanya penunjang dana untuk melakukan aktifitas KIM, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/898/898>

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini ingin melihat sejauhmana Peran KIM dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Depok Sleman Propinsi Yogyakarta, mulai dari sosialisasi KIM oleh Instansi terkait, pengorganisasian, dan cara kerja KIM yang mampu menjadi ruang komunikasi sosial masyarakat dalam mengupayakan kemakmuranarganya. Metode Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui FGD tokoh masyarakat dan pengurus KIM, wawancara dan dokumentasi. KIM di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta misalnya, telah dibentuk sejak tahun 2011 dengan berbagai kegiatan, termasuk pengentasan kemiskinan.

Kerja Komunikasi Sosial dalam optimalisasi KIM

Era demokratisasi menjadi ruang terbuka yang memungkinkan warga masyarakat untuk melakukan ekspresi dan mencapai kepentingan hajat hidup, baik secara individu maupun dalam ikatan komunal secara bebas. Kebebasan telah menjadi isu utama masyarakat di tengah arus informasi multi arah. Persoalannya justru di tengah keterbukaan dan kebebasan ternyata tak mudah memastikan bahwa semua kepentingan dan harapan dapat dengan mudah tersalurkan dan diperhatikan. Bahkan kadang beragam kepentingan membuat keadaan sulit untuk membangun kesepakatan. Begitu pula halnya dengan masalah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), hampir sama dengan yang dialami lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya bukan tidak menghadapi tantangan dan kendala.

Pergulatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah pergulatan pengelolaan informasi. Sejumlah pengalaman dan pengetahuan diklasifikasi dalam karakter dan pola

tertentu untuk dipertukarkan dan ditampilkan sebagai hal-hal yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Mengingat pada kenyataannya jumlah informasi sangat beragam dan melimpah, maka pergulatan untuk menyaring dan mengolahnya lebih lanjut menjadi problem tersendiri yang memerlukan pengetahuan. KIM berperan sebagai ruang dinamis yang menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (*Top down*) atau sebaliknya antara masyarakat dan pemerintah (*Bottom up*).

Kajian teori terkait dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menggunakan dua teori yaitu teori komunikasi sosial. Menurut Hendropuspito komunikasi sosial dapat di klasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut sudut pandang tertentu. Berikut ini jenis-jenisnya (Sutaryo, 2005)

Penelitian Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta ditulis berdasarkan temuan data dan informasi yang diukumpulkan melalui teknik wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi, yang kemudian diolah serta dideskripsikan dengan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Juni 2019. Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang terdiri dari : 5 orang pengurus, 10 anggota KIM serta 2 orang aparat pemerintah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya diolah, diinterpretasikan dan dinarasikan dengan memfokuskan penajaman makna yang deskripsikan dalam bentuk kata-kata tanpa mengubah makna aslinya (Moleong, 2002:6).

1) Komunikasi Langsung dan Tidak Langsung

Komunikasi langsung (*direct communication*) juga disebut komunikasi dari muka ke muka (*face to face*). Komunikasi jenis ini sering juga disebut komunikasi dialogis dimana pihak pengirim pesan berhubungan langsung dengan pihak penerima pesan. Seperti dalam interaksi dan kontak sosial di masyarakat, komunikasi langsung memiliki ciri khas berupa tanggapan yang diperoleh secara langsung pula. Sehingga proses komunikasi jenis ini memberikan suasana dekat dan akrab antara pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Sedangkan komunikasi tidak langsung (*indirect communication*) terjadi apabila pemberi pesan saja yang dapat mengirim lambang dan informasi dengan menggunakan media atau perantara. Bentuk komunikasi tidak langsung biasanya ditempuh untuk mengatasi bentangan jarak dan memperhitungkan kendala waktu.

2) Komunikasi Satu Arah dan Komunikasi Timbal Balik

Proses komunikasi satu arah (*one-way communication*) berlangsung secara cepat dan sekejap dari pihak pengirim pesan melalui saluran tertentu dan tanpa diketahui bagaimana respons pihak penerima pesan. Komunikasi satu arah membedakan posisi secara tegas antara pihak penerima dan pihak pengirim yang tanpa saling mengenali satu sama lain. Salurannya menggunakan media massa, baik cetak ataupun elektronik. Karena terbagi jarak dan posisi maka bentuk komunikasi satu arah terkesan tidak cair. Sementara komunikasi timbal balik (*reciprocal communication*) terjadi apabila pihak penerima pesan bisa memberikan tanggapan langsung pada pemberi pesan, sehingga ada timbal balik yang dinamis sebagai suatu transaksi menuju saling kesepahaman. Selain itu pula, komunikasi timbal balik berguna mempererat relasi antara pengirim pesan dengan penerima pesan secara akrab.

3) Komunikasi Bebas dan Komunikasi Fungsional

Makna bebas dalam komunikasi ini (*nonorganik*) berarti bahwa proses pengoperan pesan berlangsung dalam sentrum yang harus ditata sedemikian rupa atau tidak ada rambu formalitas tertentu. Meskipun begitu, bentuk komunikasi bebas memilih secara unik simbol budaya dan sosial pelakunya sebagai panduan dalam berinteraksi dalam menerima

ataupun menyampaikan pesan. Simbol budaya sosial menjadi perekat semua pihak dalam mengatur diri dan menyesuaikan dengan lingkungan.

Berbeda halnya dengan Komunikasi fungsional (*institutional*) yang memiliki lingkup konteks komunikasi yang ketat dengan aturan atau prosedur. Itu sebabnya bentuk komunikasi ini bersifat fungsional dan struktural, misalnya pejabat pemerintahan terhadap bawahannya, formalitas tertentu, seperti pinata laksana (protokoler).

4) Komunikasi Individual dan Komunikasi Massal

Komunikasi individual (*individual communication*) ditunjukkan kepada satu orang yang sudah dikenal. Pihak komunikan bukan anonym, tapi orang yang dikenal baik oleh pihak komunikator. Hasil komunikasi memiliki bobot tersendiri. Komunikasi massal (*mass communication*) ditunjukkan pada umum yang tidak dikenal. Pihak komunikan terdiri dari berbagai massa sengan berbagai sosio-kultural, ras dan usia.

Terkait dengan fungsi komunikasi Sosial, Sutaryo (2005) menjelaskan unsur dari fungsi komunikasi sosial sebagai berikut:

1. Menyuntikkan Informasi

Para warga dalam kehidupan sosial memerlukan suntikkan pengetahuan dan data karena sejumlah kondisi, antara lain:

- a) Manusia berkembang dengan meyakini bahwa terdapat suatu nilai dan keadaan akan kondisi yang diharapkan.
- b) Masing-masing manusia berbekal pengalaman dan proses yang tidak sama terkiat suatu nilai keadaan tertentu yang dianjurkan untuk ditempuh secara kolektif memegang referensi yang sama yang telah terbukti berhasil diperoleh, terkait fasilitas yang digunakan, dan ancaman yang harus di jauhi.
- c) Semua manusia berhak memperoleh wawasan bagi peningkatan kualitas dirinya yang lebih baik.
- d) Perbaikan aktivitas bersama bersumber dari mendayagunakan beragam jenis wawasan dan pengetahuan yang diberikan oleh penyelenggara pengolahan informasi dengan jenis yang bervariasi, baik kognisi, afeksi dan psikomotorik, jiwa dan raga manusia.

2. Memandu

Tata cara dan substansi komunikasi sebenarnya memandu warga untuk bergerak berganti keadaan dari waktu sebelumnya ke kondisi baru yang lebih bertenaga. Proses memandu mampu menyuntikkan semangat yang tinggi yang tampak pada pola pikir dan cara kerja produktif. Ia merupakan proses dialektis dari dua sisi yang kontras, tentang yang pas dan berguna dengan yang tidak efektif dan tak berkuasa.

Panduan meberi arah, pegangan, batasan, mendongkrak, meninggikan, menghargai, tidak menyakiti, merangkul, dan semua yang berkaitan dengan pemberkuasaan warga.

3. Ruang Cair Alternatif

Relasi sosial warga tak selamanya berjalan datar, ia sangat dinamis dan mengikuti putaran laju mobiltas lingkungannya. Keadaan yang tak diharapkan seringkali menurunkan spirit warga. Begitu juga sebaliknya, kondisi puncak seringkali menyilaukan mata. Mental menjadi elemen penting dari dua kutub ekstrem tersebut. Di antara dua kutub itu, ada ruang tengah alternatif yang memberikan imajinasi baru bagi untuk saling melengkapi, mengisi dan menyempurnakan.

Komunikasi membuka sekat setiap manusia menyusun cara baru menilai, memperkirakan, menduga, memahami dan menghayati suatu keadaan. Ruang terbuka baru komunikasi yang terhayati pelan-pelan menyibak persoalan yang sebelumnya mengaburkan

pandangan jernih warga. Interaksi dan kontak menjadi titik pertemuan membangun relasi proses pematangan diri, saling mengamati, saling bertukar pesan, saling melengkapi, dst.

KIM sebagai ruang “pemberkuasaan”

Evaluasi praktik pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan perlu dikaji ulang mengingat bahwa senyatanya kelompok miskin di desa tidak berkurang, warga yang tak memiliki aset kian bertambah, pengangguran dan kesenjangan makin lebar, dst. Perlu sebuah cara baru mentransformasikan masyarakat desa ke dalam cara-cara komunikasi yang tak hanya berlangsung pada tataran teknis saja tapi lebih menekankan dimensi substansial manusia, baik individu maupun kolektif. Badan dunia bidang pendidikan UNICEF berhasil merumuskan 5 parameter untuk melihat pencapaian proses pemberkuasaan warga pada tingkatan kolektif, yaitu: terjauhinya keadaan kekurangan, kemampuan memanfaatkan segenap sumber daya, peran optimal diri, keterlibatan dan pemantauan parameter tersebut tidak statis, bahkan saling memengaruhi, mampu mengelola iklim bersaing, saking mengisi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi:

1. **Terjauhinya Keadaan Kekurangan Kesejahteraan**
Naluri alamiah setiap manusia setiap bangsa di dunia adalah terhindarinya keadaan yang tidak menguntungkan atau kondisi serba kekurangan. Cita-cita tercukupinya semua kebutuhan merupakan tema pokok orientasi dan pengejaran hasrat yang dipahami mendorong upaya serius. Keterjangkaun sumberdaya makanan, terjaminnya kondisi tubuh yang sehat dari penyakit, tingkat penghargaan atas pekerjaan menjadi prioritas yang menjadikan gerak hidup manusia berlangsung dalam tempo yang tinggi. Pemberkuasaan dan keadaan yang tercukupi adalah sestau yang mesti diperjuangkan. Ia bersinggungan dengan pembacaan atas potensi peluang dan kemampuan mengatasi hambatan.
2. **Kemampuan Memanfaatkan Segenap Sumber daya**
Pada kenyataannya upaya manusia bisa sama namun cara dan hasil bisa sangat berbeda. Kesamaan memanfaatkan potensi atau sumber daya menjadikan antar manusia kian bersaing satu sama lain, berkonflik, berperang dan saling rebut. Sementara kemampuan menggunakan segenap potensi telah membuat perbedaan kemakmuran, memisahkan antar watga, meminggirkan tak sedikit banyak manusia masuk dalam stigma yang tak berdaya, miskin dan tak mampu. Garis perbedaan yang mencolok antara kelompok yang beruntung dan tak mampu menghantarkan manusia terpisah tak hanya secara ekonomi namun juga secara ideology. Sehingga diperlukan keberpihakan pendekatan untuk mengurangi keterpisahan kelompok agar tidak semakin lebar yang berakibat tragedi kemanusiaan.
3. **Peran Optimal Diri Kesadaran Kritis**
Perbedaan posisi dan pencapaian kelompok manusia merupakan proses rekayasa yang terstruktur dan terjadi secara masif. Ia merupakan rancangan sadar yang dilakukan dengan melibatkan tangan-tangan berpengetahuan cerdas dengan mengerahkan teknologi kelas tinggi. Perbedaan perlakuan dan perhatian berlangsung sejak dulu dan hal tersebut terus diawetkan dan dikembangkan bagi kelompok kecil yang menguasai aset besar hajat hidup orang banyak. Sehingga diperlukan gerakan kolektif terstruktur pula untuk merespons dominasi kelompok yang selama ini terlalu serakah.
4. **Keterlibatan Partisipasi**
Di sejumlah negara, sebutan bagi warganya disebut penduduk. Penduduk berasal dari kata kerja duduk, Itu berarti ia punya kuasa atas teritori yang ia duduki. Namun pada kenyataannya penduduk di negera miskin bukan lah orang yang berkuasa atas tanah dan airnya sendiri. Di Indonesia, banyak warga tidak memiliki rumah sendiri, tidak punya jangkauan memenuhi kebutuhan air untuk hidup. Penduduk Indonesia justru harus beli air minum dari sumur mereka sendiri kepada pengusaha yang diberi izin oleh pemerintah untuk mengeksploitasi sumber daya air yang melimpah. Masyarakat sekitar tambang tak pernah menikmati hasil tambang yang dikuras di area halamanya sendiri. Masyarakat lokal

tidak bisa bekerja di perusahaan besar karena dianggap tidak memiliki keterampilan. Suara rakyat tidak pernah diberi ruang dalam setiap keputusan besar yang menyangkut nasib orang banyak.

5. Pemantauan Kontrol

Jurang kelompok kaya dan miskin diawali dengan ketidakmampuan yang berarti ketidakberkuasaan yang dialami kelompok miskin. Sehingga mereka dengan mudah dikuasai oleh kelompok yang lebih berdaya atau lebih berkuasa. Pada kenyataannya warga masyarakat memang mudah bekerja bersama namun sangat sulit berusaha bersama. Fenomena tak terorganisirnya masyarakat harus dilihat bahwa masyarakat lebih senang dimobilisasi dan kurang bergairah ketika dengan suka rela pasang badan untuk maju bersama. (<http://ekonomi.upy.ac.id/ekonomi/files/.pdf>) diakses tanggal 24 September 2019

Sesat pikir pemberkuasaan dengan pemberdayaan ditandai dengan gelagat dimana upaya penyadaran manusia disihir dengan proyek-proyek yang tak memberkuasakan. Kuasa bermakna posisi dan kapasitas. Seharusnya lebih menekankan dimensi politis yang kemudian terlalu disederhanakan menjadi kegiatan praktis teknis sehingga rakyat dan masyarakat desa tidak memiliki posisi tawar karena tak berkuasa (Anwas, 2013). Menurutnya pemberdayaan (*empowerment*) harusnya berbicara di ranah substansi kuasa atau kekuatan (*power*). Kita harus tegaskan tidak terjebak dalam pemahaman instrumentalis bahwa kemampuan individu agar bertambah adalah kebaikan yang diberikan oleh orang lain tanpa menempunya masuk dalam realitas sejati. Akibatnya pemberdayaan sangat berjauhan dengan ruh mendorong *achivment* individu untuk bangkit berani menghadapi persoalan hidup dengan cara asli mereka sendiri. Harus disadari bahwa kuasa itu tidak diberikan tapi harus diperjuangkan sendiri. Pemberdayaan adalah berpihak menyediakan ruang main bagi masyarakat meraih kemakmuran atas hak hidupnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui FGD tokoh masyarakat dan pengurus KIM, wawancara, dan dokumentasi. KIM di Depok, Sleman, Yogyakarta. Penelitian Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta ditulis berdasarkan temuan data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi, yang kemudian diolah serta dideskripsikan dengan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Juni 2019. I

nforman dalam penelitian ini berjumlah 17 orang terdiri dari : 5 orang pengurus, 10 anggota KIM serta 2 orang aparat pemerintah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya diolah, diinterpretasikan dan dinarasikan dengan memfokuskan penajaman makna yang deskripsikan dalam bentuk kata-kata tanpa mengubah makna aslinya (Moleong, 2002:6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Lapangan

Data dibagi menjadi tiga, yaitu data tentang sosialisasi KIM dan Koordinasi kepada instansi dan tokoh masyarakat, koordinasi KIM kepada instansi dan tokoh masyarakat dan data tentang penyampaian informasi secara tepat kepada masyarakat.

Sosialisasi KIM dan Koordinasi kepada instansi dan tokoh masyarakat

Penelitian Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta ditulis berdasarkan temuan data dan informasi yang diukumpulkan melalui teknik wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi,

yang kemudian diolah serta dideskripsikan dengan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Juni 2019. Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang terdiri dari : 5 orang pengurus, 10 anggota KIM serta 2 orang aparat pemerintah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya diolah, diinterpretasikan dan dinarasikan dengan memfokuskan penajaman makna yang deskripsikan dalam bentuk kata-kata tanpa mengubah makna aslinya (Moleong, 2002:6).

Peran KIM Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta dalam memberdayakan masyarakat dipilah menjadi dua hal utama yaitu sosialisasi, koordinasi, dan pemberdayaan masyarakat. Peran sosialisasi dilakukan karena KIM baru pada tahap awal atau masih baru sehingga harus dikenalkan kepada masyarakat di semua lapisan. Peran koordinasi dilakukan oleh KIM kecamatan Depok karena sifatnya tugasnya adalah koordinatif saja dalam memberdayakan masyarakat. Peran-peran ini diuraikan di bab ini.

1. Sosialisasi KIM

Sosialisasi dan koordinasi sangat penting dalam tahap awal pembentukan KIM. Dikatakan penting karena keberadaan KIM di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta merupakan kelompok yang dibentuk secara *top down* dari atas di bawah koordinasi Bagian Humas Kabupaten Sleman. Sosialisasi dimaksudkan untuk mengenalkan keberadaan, tugas dan fungsi KIM kepada instansi pemerintah ataupun swasta di Kecamatan Depok. Sosialisasi belum pada taraf mengenalkan program kerja karena sejak awal dibentuk belum pernah menyusun program kerja. Hal ini terungkap dalam wawancara sebagai berikut:

“KIM diasosiasikan Klompencapir, tapi bagi masyarakat luas masih asing dengan KIM, hanya RT, RW, dukuh saja yang tahu KIM karena saat pembentukan di desa Condong Catur mereka juga terlibat sehingga ada dukungan. Jadi yang tahu KIM tentu mendukung. Sedangkan masyarakat yang tidak ikut kegiatan sosial kemasyarakatan ya tentu tidak tahu KIM” (wawancara dengan Supeno).

Fakta menunjukkan bahwa sejak awal sosialisasi dan pembentukan KIM terlihat sangat kontras, antara masyarakat yang mendukung karena kebetulan menjadi pengurus RT, RW dan Dukuh. Sementara masyarakat lain tentu saja tidak mengetahui sama sekali terkait KIM. Dampak berikutnya yang terjadi adalah pada kepengurusan KIM yang tidak kuat karena minim dukungan warga. Pembentukan pengurus KIM diinisiasi dari kecamatan, dalam hal Camat Depok dengan alasan bahwa yang duduk sebagai pengurus merupakan warga yang memiliki peran sosial strategis di masyarakat dengan harapan pengurus akan mengerti dinamika yang berlangsung di tengah-tengah pergumulan hidup warga desa. Sehingga pengurus KIM diprioritaskan bagi warga yang sebelumnya telah memiliki peran kemasyarakatan seperti: pegawai kecamatan, perangkat desa, dukuh, LKD dan pengurus PKK.

Berdasarkan temuan lapangan diperoleh bahwa sosialisasi KIM kepada masyarakat diselenggarakan dalam forum yang sangat formal, namun tidak fokus berbicara terkait KIM. Informasi dan sosialisasi KIM dilakukan kepada para kepala desa dan kepala dukuh terbatas pada saat pertemuan dengan internal perangkat desa atau dalam pertemuan warga. Guna memudahkan tugas dan fungsi KIM, pada saat sosialisasi selalu menekankan bahwa KIM lebih kurang sama seperti Klompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pirsawan) pada masa pemerintahan Presiden Suharto. Jadi, KIM memiliki tugas: 1) mengumpulkan informasi melalui kegiatan mendengarkan, membaca dan mengamati berita apa yang ada di masyarakat melalui media massa, 2) mengolah informasi, dan 3) menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pada awal terbentuknya, KIM dikenal oleh para tokoh pejabat dan pegawai dari tingkat kecamatan hingga pemerintah desa. Meskipun demikian, masih saja ada yang tidak mengenal KIM. Salah seorang informan mengatakan sebagai berikut:

“Pernah ketika menyampaikan ke pemda malah ditanya KIM itu apa? Dulu saya pernah ke kabag humas, tolong disampaikan kepada KIM DIY untuk mensosialisasikan KIM kepada masyarakat luas” (Keterangan, FGD).

Kenyataan di atas memperlihatkan bahwa KIM masih belum disosialisasikan dengan baik. Sosialisasi merupakan tahapan penting guna mendapatkan dukungan dari masyarakat karena peran KIM hanya dapat berjalan dengan baik ketika masyarakat berpartisipasi.

Sosialisasi kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat hanya dilakukan pada awal KIM berdiri pada tahun 2009. Selanjutnya, sosialisasi dilakukan oleh pengurus KIM sendiri. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tidak semua orang yang dicantumkan dalam kepengurusan terlibat dalam kegiatan, bahkan ada pengurus yang tidak mengetahui bahwa dirinya masuk dalam jajaran pengurus KIM. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari proses pembentukan KIM yang diusulkan dari atas yaitu Humas Pemerintah Kabupaten Sleman.

Sosialisasi kepada internal pengurus tampak kurang dilakukan secara serius dan sistematis. Alasannya, para pengurus KIM adalah juga para tokoh masyarakat yang dalam berbagai kesempatan sering bertemu meskipun bukan dalam rangka KIM. Informasi tentang KIM memang disampaikan, tetapi karena bukan dalam kerangka kegiatan KIM, maka informasi tentang KIM terkesan kurang penting dan dipandang sebagai kegiatan sampingan yang bisa dikesampingkan. Salah seorang informan yang juga Ketua LPK menjelaskan sebagai berikut:

“Para pengurus KIM adalah juga para tokoh masyarakat yang dalam berbagai kesempatan sering bertemu, ada perwakilan dukuh, RW dan RT. Karena sering bertemu, jadi tetap ada komunikasi satu dengan yang lainnya (Komentar Umiyati dalam FGD, 2019).”

Pengurus KIM sangat jarang mengadakan pertemuan. Bahkan sejak tahun 2012 sampai tahun 2019 yaitu saat penelitian ini dilakukan, pengurus tidak lagi mengadakan pertemuan. Salah seorang pengurus menjelaskan bahwa pertemuan memang tidak dilakukan, tetapi komunikasi antar pengurus tetap berjalan. Hal ini berarti tukar menukar informasi tetap berlangsung.

Tidak hanya dengan sesama pengurus, tetapi juga tukar menukar informasi dengan warga atau tokoh masyarakat yang lainnya. Salah seorang pengurus yang aktif di KIM menjelaskan bahwa dilihat dari aktivitas para tokoh masyarakat yang juga pengurus KIM, pada dasarnya fungsi mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan informasi sudah berjalan dengan baik. Penjelasan ini menjadi pembelaan diri pengurus KIM, bahwa KIM aktif melakukan sosialisasi. Penjelasan ini juga membuktikan bahwa tanpa KIM pun, para tokoh masyarakat sebenarnya telah menjalankan fungsi mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada warga masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat belum dapat membedakan ada dan tidak adanya KIM.

Berjalankan roda organisasi KIM tidak lepas dari keberadaan pengurus inti, khususnya ketua KIM. Ketua KIM Kecamatan Depok yaitu Sudiyono adalah juga PNS di kantor kecamatan Depok yang sudah disertai banyak peran dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Di satu sisi menguntungkan guna memudahkan sosialisasi KIM kepada jajaran pemerintahan Kecamatan dan Desa serta masyarakat, tetapi di sisi lain menjadikan KIM tidak fokus. Meskipun ketua KIM, Sudiyono tidak selalu menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatannya sebagai representasi atau mewakili KIM.

Para pengurus KIM sendiri juga tidak peduli apakah Sudiyono sebagai bagian dari KIM atau bukan. Masyarakat tampak lebih memperhatikan Sudiyono sebagai tokoh masyarakat daripada sebagai ketua KIM. Kehadiran Sudiyono lebih diperhatikan oleh masyarakat daripada KIM itu sendiri. Fakta ini membuktikan bahwa KIM tidak melembaga di masyarakat sehingga peran dan fungsi KIM tersubordinasi oleh Sudiyono sebagai person dan sebagai tokoh masyarakat.

Pengurus lainnya juga bersikap sama, mereka tidak melihat posisinya dalam kepengurusan KIM kecamatan Depok sebagai suatu peran yang harus dijalankan. Secara substansi, kegiatan mengumpulkan informasi, mengolah dan menyampaikan informasi sudah melekat dalam diri para pengurus sebagai tokoh masyarakat sehingga keberadaan KIM itu sendiri seolah-olah melebur dalam peran para pengurusnya sebagai tokoh masyarakat. Akibatnya, masyarakat sendiri tidak banyak yang mengetahui eksistensi dan peran KIM.

2. Koordinasi KIM kepada instansi dan tokoh masyarakat

Koordinasi dilakukan sebagai upaya membangun kerjasama antara KIM dengan semua *stakeholders* yaitu instansi pemerintah, instansi swasta dan masyarakat. KIM harus berkoordinasi dengan banyak pihak karena aktivitasnya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas masyarakat. Dalam FGD terungkap bahwa ketua KIM selalu berkomunikasi dengan pihak swasta seperti lembaga kursus dan LSM. Koordinasi dilakukan agar dirinya sebagai ketua KIM mendapatkan banyak informasi tentang kegiatan atau program yang dapat diikuti oleh warga masyarakat.

Koordinasi dengan pihak swasta dilakukan dengan karang taruna, PNPM Mandiri, TPK Gender, dan LPK. Koordinasi dengan pihak swasta ini dilakukan secara informal saja karena ketua KIM mengenal secara pribadi dari masing-masing ketuanya. Koordinasi melalui komunikasi personal ini dipandang efektif untuk mendapatkan informasi. Misalnya, LPK membuka kursus tentang videografi bagi keluarga tidak mampu di wilayah kecamatan Depok, maka Sudiyono sebagai ketua KIM menginformasikan kegiatan kursus ini kepada masyarakat. Namun penyebaran informasi ini tidak dilakukan secara sistematis karena Sudiyono hanya menyampaikan secara sambil lalu sebagai kegiatan sampingan pada saat dirinya menghadiri pertemuan warga atau pada saat bertemu warga yang diperkirakan membutuhkan program kursus tersebut.

Waktu awal, ketua KIM yang lama cukup idealis dan berpengalaman. Dalam menjalankan tugasnya, rajin mendatangi pertemuan-pertemuan warga untuk menyerap dan menyampaikan informasi. Sering berkoordinasi dan rapat dengan camat, lurah atau pejabat lainnya. Tapi juga sering mengeluh karena koordinasi sulit karena kesibukan dari orang-orang bersangkutan yang tidak hanya berperan di KIM, tetapi juga tugas-tugas lainnya.

Koordinasi dengan karangtaruna, dengan TPK Gender juga relatif sama yaitu hanya berupa koordinasi secara informal dan bersifat personal. Hal ini menjadikan peran KIM menjadi tidak optimal. Koordinasi pada dasarnya harus dilakukan secara vertikal maupun secara horisontal. Secara vertikal, KIM Kecamatan Depok pernah melakukan koordinasi dengan bagian humas Pemda Kabupaten Sleman.

Koordinasi merupakan peran yang paling banyak dilakukan karena KIM kecamatan Depok berada pada posisi koordinatif dengan KIM yang ada di bawahnya baik di tingkat Desa atau di Pedukuhan. Di tingkat bawah yaitu di tengah masyarakat, KIM memang bervariasi.

Kelompok informasi masyarakat ada yaitu gapoktan (gabungan kelompok tani), ada karang taruna, dan PKK. Gapoktan bukan hanya membahas pertanian, tetapi juga perikanan dan peternakan. KIM di condong catur bisa merupakan lembaga-lembaga yang sudah ada seperti gapoktan, PKK, dasa wisma, kader kesehatan, satgas

antinarkoba, karangtaruna (wawancara dengan Supeno, pengurus KIM Desa CondongCatur, 2019).

KIM adanya di tingkat kecamatan, di desa ada perwakilan yang bergerak di masing-masing organisasi. Dengan adanya KIM di tingkat basis atau di bawah, maka proses menyerap aspirasi, dan menyampaikan informasi menjadi mudah. Misalnya ada rapat koordinasi kesehatan tiap bulan yang diikuti oleh posyandu balita, posyandu lansia dan kader kesehatan, maka dalam forum itu, KIM meminta waktu untuk mengisi acara tersebut.

Penyampaian informasi secara tepat kepada masyarakat.

Penyampaian informasi merupakan bagian dari aktivitas KIM. Setelah informasi dikumpulkan, informasi diolah. Pengolahan informasi dimaksudkan untuk memetakan isu yang ada di masyarakat, memetakan siapa atau kelompok yang membutuhkan informasi tersebut, waktu dan tempat yang tepat untuk menyampaikan informasi dan metode atau media yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi tersebut.

Informasi yang disampaikan disesuaikan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Tujuannya adalah memberikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Misalnya ketika Pemda Sleman menggulirkan program Kabupaten Layak Anak, informasi ini disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu kriteria layak anak dan mengusahakannya. Syarat disebut layak anak adalah terpenuhinya hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan seni budaya. Pemanfaatan waktu luang membutuhkan sarana sarana bermain anak yang ramah anak. Namun sarana bermain di Depok sendiri masih sangat kurang.

Pada acara tersebut ditetapkan Forum Anak Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta. Forum ini merupakan bagian dari prosesi pembentukan Forum Anak di 17 Kecamatan dikemas dalam paket yang sama oleh Joko Sukamto (Josuke) dari Fasilitator Anak Nasional bersama Anak-anak dari Forum Anak Sleman (FORANS) (<http://kla.slemankab.go.id/>). Dengan adanya KIM di tiap-tiap Desa maka program kabupaten layak anak dapat diketahui dan dibahas oleh banyak warga dan dibicarakan atau menjadi isu di masyarakat.

Terkait dengan penyampaian informasi, terungkap informasi bahwa banyak program pemerintah yang disosialisasikan kepada masyarakat oleh pengurus KIM. Hal ini dikemukakan Supeno berikut ini.

Dalam rapat-rapat warga di dusun bisa dimanfaatkan untuk membahas isu misalnya tentang IMB, misalnya tentang narkoba ya kita fasilitasi dengan mengundang narasumber (Wawancara dengan Supeno, 2019).

Ketika banyak isu kesehatan bagi perempuan yaitu isu kanker serviks, maka pengurus KIM menyampaikan informasi tentang kanker serviks kepada ibu-ibu PKK. Orang yang bertugas menyampaikan informasi tersebut adalah kader kesehatan. Hal ini dikemukakan dalam kutipan wawancara berikut.

Untuk pemberdayaan masyarakat ibu-ibu di Condong catur dilakukan melalui PKK. Dalam satu desa ada beberapa pokja, masing-masing pokja menyampaikan informasi ke PKK pedukuhan setiap tanggal 4. Misalnya sosialisasi bahaya kanker serviks di PKK desa, kemudian difollow up dengan pemeriksaan gratis di desa. Jadi pemberdayaannya tepat sasaran (Wawancara dengan Supeno, 2019).

Ketika Desa Condongcatur mendapat bantuan hibah dana stimulasi ekonomi produktif, informasi ini disampaikan kepada kelompok-kelompok usaha. Sebagai gambaran, di dusun

Joho banyak *home industri*, maka informasi ini disampaikan di masyarakat Joho. Hal ini dikemukakan dalam kutipan wawancara berikut:

Contoh lainnya dalam bidang ekonomi yaitu ada hibah untuk kegiatan usaha. Kita menginformasikan kepada kelompok usaha yang ada, ini ada uang 39 juta dari dinas sosial, monggo yang mau memanfaatkan mengajukan proposal ke pemerintah desa. Ini terkait dengan KUBE. KUBE bisa perempuan bisa laki-laki (Wawancara dengan Supeno, 2019).

Analisis Data

Menerjemahkan kegiatan utamanya, KIM memiliki tiga kegiatan utama yaitu mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Peran KIM dalam memberdayakan masyarakat selalu terkait dengan tiga kegiatan utama tersebut. Peran sosialisasi menjadi keharusan mengingat KIM merupakan lembaga kemasyarakatan yang relatif baru dan hasil dari inisiasi pemerintah. Sosialisasi diharapkan dapat menghasilkan dukungan terhadap eksistensi dan peran KIM di masyarakat.

Sosialisasi tentang keberadaan dan peran KIM dapat dikatakan tidak berhasil. Terbukti masih ada pihak-pihak yang belum mengenal KIM dengan baik, seperti sebagian warga masyarakat, tokoh masyarakat, bahkan ada kepala desa yang tidak mengenal KIM. Hal ini dapat dimaklumi karena sosialisasi KIM hanya dilakukan pada awal pembentukan KIM kecamatan Depok pada tahun 2009. Selanjutnya tidak ada lagi sosialisasi, kecuali secara terbatas oleh pengurus inti terutama ketua KIM sendiri.

Sosialisasi yang minim tidak berarti KIM dikatakan gagal dalam menjalankan perannya. Hasil *focuss group discussion* dengan para pengurus KIM dan mitra KIM di kantor kecamatan Depok mengemukakan fakta bahwa Ketua KIM cukup aktif mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, atau sebaliknya menggali informasi dari masyarakat dan disampaikan kepada pemerintah. Ketua KIM menjelaskan bahwa tetap memiliki peran dan dapat dijalankan melalui kerja-kerja yang dilakukan terutama oleh dirinya sendiri sebagai ketua ataupun beberapa pengurus yang lainnya.

Mengumpulkan dan mengolah informasi dari masyarakat

KIM menjembatani informasi kepada masyarakat. Masyarakat dapat mencari informasi melalui KIM. Berdasarkan SK pembentukan pengurus KIM, kepengurusan KIM hampir sama dengan kepengurusan dalam Klompencapir. Ada seksi pengumpulan data, seksi pengolahan informasi dan seksi penyampaian informasi.

Kepengurusan yang disebutkan dalam KIM ternyata tidak berjalan sama sekali. KIM secara kelembagaan tidak pernah mengadakan rapat-rapat atau pertemuan guna membahas program kerja atau kegiatan KIM. Kondisi ini memperlihatkan proses pelebagaan KIM di masyarakat belum berhasil. Peran personal yang dijalankan oleh ketua KIM di satu sisi menunjukkan eksistensi KIM, pada sisi lain menegaskan bahwa secara organisatoris KIM tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Peran ketua yang dinyatakan sebagai peran KIM memang diapresiasi oleh pengurus KIM lainnya sebagai representasi dari KIM itu sendiri. Peran ketua dalam mengumpulkan dan mengolah informasi memang dilakukan secara personal oleh ketua KIM yang kebetulan sebagai pegawai kecamatan Depok dan juga tokoh masyarakat di Desa Maguwoharjo. Kapan dirinya berperan sebagai ketua KIM dan kapan dirinya berperan sebagai pegawai kecamatan ataupun tokoh di Desa Maguwoharjo memang tidak ada batasan yang jelas. Masyarakat tidak membutuhkan kejelasan peran tersebut. Masyarakat lebih membutuhkan adanya pelayanan yang lebih baik. Karena itu, ketika ada figur tokoh masyarakat yang bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat dan meneruskannya kepada pihak-pihak terkait, maka masyarakat sudah merasa senang. Peran-peran

menggali informasi atau aspirasi dari masyarakat sudah menjadi kegiatan sehari-hari ketua KIM, meskipun tidak mengatasnamakan KIM.

Mengumpulkan dan Mengolah informasi dari pemerintah

KIM kecamatan Depok mengikuti kegiatan di intern dan eksternal yaitu dengan mengikuti kegiatan KIM yang diadakan diluar kecamatan Depok Sleman Yogyakarta seperti di kabupaten dan DIY. Kegiatan KIM di kabupaten ataupun di DIY merupakan kegiatan yang bersifat vertikal dan tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Namun ini penting sebagai bentuk penyerapann informasi dari pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta.

Kegiatan mengumpulkan informasi dari pemerintah, terutama yang ada di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta dapat dilakukan dengan mudah karena ketua KIM adalah juga pegawai di kantor Camat Depok. Setiap kali rapat atau pertemuan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, ketua KIM selalu hadir. Informasi yang didapat ini kemudian disampaikan kepada masyarakat. Fakta ini menegaskan bahwa peran KIM dalam pemberdayaan masyarakat melekat pada diri ketua KIM, bukan pada pengurus KIM.

Fakta ini juga menegaskan bahwa KIM sebagai sebuah lembaga yang resmi tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa secara internal, tidak ada pertemuan atau kegiatan, tetapi komunikasi di antara pengurus KIM berjalan dengan baik karena kepengurusan KIM di isi oleh para tokoh masyarakat sendiri yang setiap hari berkegiatan di masyarakat. Namun komunikasi dengan sesama pengurus KIM bukan dalam rangka KIM tetapi komunikasi dilakukan sebagai wujud peran mereka sebagai penggerak kegiatan sosial kemasyarakatan.

Menyampaikan informasi kepada masyarakat

Pengurus KIM kecamatan Depok banyak menyebar di desa-desa, tetapi anggotanya banyak dan sibuk sendiri-sendiri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Penyampaian informasi kepada masyarakat beberapa kali pernah dilakukan, tetapi keputusan untuk mengadakan kegiatan menyampaikan informasi merupakan inisiatif ketua KIM setelah berkoordinasi dengan pemerintah. Pengurus KIM sendiri tidak mengetahui kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan. Hal ini terjadi karena masyarakat, termasuk para penggerak kegaitan sosial kemasyarakatan tidak menonjolkan aspek kelembagaan KIM, tetapi lebih menonjolkan substansi dari penyebaran informasi tersebut.

Kegiatan penyebaran informasi yang pernah dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat dengan cara mengundang warga masyarakat, misalnya dengan informasi Jamkesda serta hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu bagaimana cara mengurus jamkesda. Kegiatan ini dilaksanakan atas kesepakatan ketua KIM dan kantor kecamatan Depok serta dinas kesehatan dan dinas sosial.

Secara personal, pengurus KIM menyampaikan informasi dalam bentuk kegiatan sosialisasi ke masyarakat yang dijalankan oleh tokoh masyarakat yang sebenarnya juga bagian dari pengurus KIM. Masyarakat tidak begitu peduli apakah penyampaian informasi tersebut dilakukan dalam rangka kerja KIM atau bukan. Tokoh masyarakat setempat juga tidak pernah menyatakan peran dirinya sebagai bagian dari kerja-kerja KIM.

KIM berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Sumber informasi dari instansi bersangkutan termasuk media massa seperti surat kabar, radio dan televisi. Bentuk penyebaran informasi dilakukan dalam berbagai cara, misalnya pada tahun 2013 mengadakan festival kebudayaan selama dua hari. Kegiatan budaya ini ada unsur edukasinya. Di dalamnya juga ada lomba berbusana jawa. Sebelum festival juga diadakan pelatihan tentang budaya jawa seperti bahasa dan busana jawa.

Penyampaian informasi dilakukan setelah informasi diolah. Informasi disampaikan dengan mempertimbangkan sasaran, tempat dan metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Hal ini dikemukakan Sudiyono berikut ini.

KIM tugas pokoknya adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat baik melalui media massa atau secara langsung. Selain itu juga mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Juga pengolahan informasi. Dalam hal ini dipetakan informasi ini disampaikan kepada siapa dan dimana, dalam forum apa, misalnya untuk informasi pertanian disampaikan di masyarakat desa Maguwoharjo, informasi tentang bisnis disampaikan di masyarakat Condongcatur (Keterangan dalam FGD).

Orang yang bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat yaitu seksi penyampaian informasi. Pada saat menyampaikan informasi tersebut, juga menangkap dan menyerap informasi dari masyarakat misalnya ada keluhan dari masyarakat tentang harga pupuk yang mahal, informasi ini kemudian diolah lagi untuk disampaikan kepada instansi di atas yang sesuai misalnya apakah ke kecamatan, dinas pertanian, atau yang lainnya.

Bekerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam memberikan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat

KIM tidak secara langsung melakukan pemberdayaan masyarakat karena tidak ada alokasi dana khusus untuk KIM Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta. Namun demikian, karena fungsinya koordinatif, maka KIM tetap dapat berjalan dengan cara memanfaatkan forum-forum kelompok masyarakat yang sudah ada untuk menyerap dan menyampaikan informasi

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, KIM menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nantinya KIM mencari narasumber atau menyalurkan kepada instansi terkait misalnya LPK atau yang lainnya. KIM tidak mampu melakukan sendiri, tetapi hanya menyalurkan, misalnya di LPK yang dipimpin **Umiyanti** itu ada kegiatan apa, KIM memasyarakatkan atau memasarkan atau meramaikan agar masyarakat mengetahui. Bagi masyarakat yang berminat dapat langsung menghubungi LPK bersangkutan. Misalnya jika ada yang butuh modal, kita sampaikan informasi ada SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang bisa membantu.

Peran KIM dalam hal ini dapat dijalankan oleh mitra-mitra KIM seperti PNPM pedesaan, LPK, TPK, atau LSM lainnya. Dengan adanya KIM, maka penyebaran informasi dapat lebih cepat karena pada kenyataannya sering informasi tentang pemberdayaan masyarakat terhambat atau berhenti di birokrasi pemerintahan.

KIM itu ditingkat kecamatan idealnya pada posisi koordinasi kemudian KIM di tingkat basis ada kelompok-kelompok informasi yang sesuai dengan permasalahan dan perhatian serta kebutuhan masyarakat. KIM ada di tiap kecamatan, tetapi aktivitasnya bersumber dari anggaran yang dimiliki pos lain karena KIM tidak memiliki dana sendiri. Artinya, KIM mendompleng kegiatan dari bidang lain sehingga KIM tidak mengeluarkan dana sendiri. Mekanismenya, KIM menggali informasi dari masyarakat melalui KIM di tingkat basis seperti PKK, dasawisya, kelompok tani, dan sebagainya, kemudian ketua KIM kecamatan menghubungi humas kecamatan, selanjutnya humas mencari narasumber yang berkompeten.

Terkait tentang Jamkesda ataupun BPJS, kami telah berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas tenaga kerja, untuk mengkonfirmasi apakah perlu ada sosialisasi. Setelah sepakat perlu ada, kemudian kami mengundang perwakilan warga untuk datang ke dalam acara sosialisasi yang diadakan di kecamatan Depok. Pihak dinas kesehatan yang menjadi narasumbernya.

Menjalin kerjasama dengan KIM terutama secara informal yaitu langsung dengan menjalin koordinasi dengan ketua KIM karena kebetulan sering bertemu dalam rapat-rapat dan kebetulan juga rumahnya dekat dengan rumah ketua KIM. Namun **Umiyanti** lupa apabila dirinya ada dalam struktur kepengurusan KIM kecamatan Depok.

Bu **Umiyanti** memimpin TPK (Tim Pengentasan Kemiskinan) yang bergerak seperti LPK yang memberikan kursus-kursus kepada warga kurang mampu. Kursus yang saat ini diberikan adalah kursus vidiografi berupa keterampilan mengambil foto, melakukan shooting dan editingnya. Kursus ini dikhususkan untuk warga Kecamatan Depok, tetapi apabila kuota warga belajar tidak terpenuhi, LPK ini juga membuka kesempatan bagi warga luar untuk mengikuti kursus ini. Pendanaan LPK ini bersumber dari pemerintah berupa *blockgrant* melalui APBD.

Informasi tentang adanya kursus ini disampaikan ke desa-desa secara langsung dan juga melalui KIM. Pengurus KIM, khususnya pak Sudi sebagai ketua biasanya menindaklanjuti dengan menyampaikan informasi tersebut dengan cara menyampaikan ke forum-forum pertemuan warga atau langsung disampaikan kepada warga yang diperkirakan membutuhkan program kursus tersebut.

LPK mengirim surat kepada pemerintah desa. Informasi ke desa-desa disampaikan kepada Kaur Kesra desa setempat untuk selanjutnya diteruskan ke warganya. Dalam hal ini, sosialisasi ke warga yang dilakukan pemerintah desa diserahkan kepada pemerintah desa setempat. Sosialisasi di Desa Maguwoharjo dilakukan dengan cara surat dari LPK kemudian disampaikan dalam rapat koordinasi dukuh-dukuh. Selanjutnya, sampai tidaknya informasi ini sampai kepada warga bergantung pada kepala-kepala dukuh.

Responden lain ibu Umiyanti ini menegaskan bahwa informasi memang sering berputar di jaringan birokrasi pemerintah saja, dan kurang menyebar ke semua lapisan masyarakat. Proses menyebarkan informasi ini perlu menggunakan jaringan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat.

Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa KIM kecamatan Depok selalu berkoordinasi dengan berbagai komponen masyarakat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. KIM di kecamatan menjalankan fungsi koordinasi sedangkan pelaksanaan pemberdayaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dilakukan oleh para mitra KIM seperti LPK, kader kesehatan, dan sebagainya. Koordinasi ini pasti terjadi karena orang-orang yang aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan hanya itu-itu saja sehingga selalu bertemu.

Guna memudahkan penyerapan informasi, dan penyampaian informasi, sudah membuka accaount media sosial facebook yang dapat diakses oleh semua warga kecamatan Condongcatur. Ide ini diwujudkan oleh Sekdes Condongcatur.

Pemberdayaan adalah sebuah proses, sehingga tidak bisa dipahami sebagai proyek tunggal dengan awal dan akhir. Penjaringan atau penyerapan informasi dari masyarakat dan penyampaian informasi dalam kegiatan KIM merupakan wujud dari kegiatan pemberdayaan. Suatu cara atau filosofi dimana pelaksanaan dan penyesuaiannya memerlukan pembinaan dan proses yang cukup lama (Wilson, 1996). Proses ini dapat dibagi menjadi empat tahapan dalam proses pemberdayaan yaitu penyadaran, *understanding* atau pemahaman, *harnessing* atau memanfaatkan, *using* atau menggunakan keterampilan dan kemampuan.

Proses pemberdayaan melalui penyadaran seperti dikemukakan Wilson di atas tidak terjadi dalam pemberdayaan oleh KIM. KIM Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta memang melakukan kegiatan penyebaran informasi meskipun hanya dilakukan dengan cara membonceng kegiatan yang sudah ada di masyarakat. Kegiatan sosialisasi tentang kanker servic, Jamkesda atau BPJS, serta kabupaten ramah anak dan desa ramah anak merupakan bagian dari membangun kesadaran tentang pentingnya memberdayakan masyarakat.

Tahapan pemahaman atau *understanding* dalam kegiatan KIM juga tidak dapat diukur karena kegiatan penyebaran informasi hanya membonceng pada kegiatan lainnya. Idealnya, penyebaran informasi mencapai pada proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan yang dituntut dari mereka oleh komunitas. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk membahas isu-isu yang dibutuhkan masyarakat sendiri, maka masyarakat tidak hanya sadar tetapi juga memahami pentingnya persoalan sehingga perlu dibahas di dalam kelompoknya. Secara substansi, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sudah menonjol sebelum adanya KIM. Artinya, pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat bukan karena peran KIM.

Tahapan dalam pemberdayaan yaitu harnessing atau memanfaatkan. Hal ini tampak dengan kesediaan ibu-ibu untuk datang dalam kegiatan pemeriksaan kanker serviks di Desa Condongcatur. Dalam hal ini, KIM juga dalam posisi membonceng kegiatan, jadi KIM bukan penyelenggara karena perannya terbatas pada menggali, mengolah dan menyebarkan informasi. Dalam konteks ini, KIM lebih banyak berperan dalam menyebarkan informasi tentang adanya pemeriksaan kanker serviks di balai Desa Condongcatur.

Setelah mendapat informasi tentang kegiatan pemeriksaan kanker serviks bagi ibu-ibu, mereka bersedia untuk memanfaatkan informasi yang disampaikan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang substansinya adalah pelaksanaan fungsi dari KIM itu sendiri.

Idealnya, pemberdayaan masyarakat berpegang pada prinsip seperti dikemukakan Rubin yaitu *break-even* dalam setiap kegiatan, melibatkan partisipasi masyarakat, kegiatan pelatihan, memaksimalkan sumber daya, dan menjembatani antara kepentingan masyarakat dan pemerintah (Sumaryadi, 2005). Pada kenyataannya, peran KIM dalam memberdayakan masyarakat tidak pernah memikirkan prinsip-prinsip tersebut di atas. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.

Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Pemberdayaan masyarakat dapat disamakan dengan pengembangan kapasitas masyarakat. Tanpa adanya pengembangan kapasitas, maka tidak terjadi pemberdayaan. Pengembangan masyarakat adalah proses peningkatan kesadaran masyarakat itu sendiri. Salah satu aspek dari peningkatan kesadaran adalah terbukanya peluang-peluang untuk tindakan menuju perubahan. Peningkatan kesadaran itu dapat dicapai melalui beberapa strategi, diantaranya melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, dan melalui pendidikan dan penyadaran. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran menekankan pentingnya suatu proses edukatif atau pembelajaran (dalam pengertian luas) dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka, sehingga masyarakat memiliki gagasan-gagasan, pemahaman, kosakata, dan keterampilan bekerja menuju perubahan yang efektif dan berkelanjutan (Ife & Tesoriero, 2008).

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat setiap saat perlu dievaluasi guna mendapatkan umpan balik. Fujikake menjelaskan bahwa evaluasi pemberdayaan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mencoba memahami pencapaian pemberdayaan dari pandangan masyarakat sebagai pelaksana program. Pendekatan ini mencoba memahami hubungan antara tanggapan masyarakat dengan tujuan pemberdayaan itu sendiri untuk kemudian dituangkan dalam gambar-gambar dan skema-skema konsep tertentu. Model evaluasi yang dikembangkan Fujikake telah dipraktikkan dalam mengevaluasi pemberdayaan perempuan di sebuah desa di Paraguay

mengembangkan empat langkah dalam mengevaluasi pemberdayaan. Tahap pertama adalah melihat perubahan masyarakat dari tingkat kesadarannya. Hasil dari analisis mengenai perubahan tingkat kesadaran ini dituangkan dalam grafik yang menggambarkan tingkat perubahan kesadaran yang diklasifikasikan menjadi 3 yaitu “sangat baik”, “telah berubah”, dan “tidak seperti sebelumnya” (Fujikake, 2008).

Keterlibatan para tokoh masyarakat dalam kelompok-kelompok masyarakat di tingkat desa dan pedukuhan maupun tingkat RW dan RT memudahkan proses pemberdayaan masyarakat. Para tokoh masyarakat ketika menyerap dan menyampaikan informasi pada dasarnya menjalankan fungsi sebagai komunikator pembangunan. Fungsi komunikator pembangunan mengandung arti usaha pendidikan, persuasif, penyampaian ide-ide baru (inovasi) bertujuan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, wawasan, dan cita-cita menuju pada suatu perubahan sikap dan tingkah laku (Dilla, 2007). Sehingga terlihat bahwa agen perubahan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam memberikan wawasan pengetahuan kepada khalayak, dalam hal ini adalah masyarakat sebagai penerima pesan pembangunan. Melalui agen perubahan inilah diharapkan akan terjadi proses diskusi untuk menyamakan pemahaman khalayak, yang pada akhirnya didapatkan perubahan perilaku khalayak yang mendukung program-program yang sudah digulirkan pemerintah.

Dengan adanya KIM maka para tokoh yang merupakan komunikator pembangunan adalah agen perubahan. Lebih lanjut dikatakan oleh Jim Ife bahwa pengembangan masyarakat melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk saling bekerja, mengembangkan struktur yang berarti orang-orang menjadi bergantung satu sama lain untuk mencapai segala sesuatu, dan mencari cara-cara yang memberi pengaruh kepada setiap orang dan dihargai orang lain (Ife, 2002). Melalui wadah KIM, maka para tokoh masyarakat lebih banyak dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Konsep pembangunan atau pemberdayaan merupakan sebuah ruang pergaulan hidup bersama yang memiliki tujuan memanusiasikan, memandirikan, memberkuasakan. Hal ini tidak sekedar persoalan teknis yang bisa dilibas dengan cara-cara *instant*-pragmatis atas nama “proyek” dengan berbagai pelatihan-pelatihan yang lebih banyak tak mengena. Pemberkuasaan itu memiliki nilai, pengetahuan dan juga ideologi yang nyata melampaui kerja-kerja karikatif yang selama ini terbukti tidak berhasil mencapai masyarakat adil dan makmur.

KIM ke depan harus diletakkan pada upaya-upaya memberkuasakan warga untuk mengkonsolidasikan seluruh potensi lokal desa, menjadi jembatan transformasi kolektif dengan target utama kemakmuran masyarakat lokal desa setempat berdasarkan potensi sosial-kultural dan lingkungannya. Memberkuasakan desa berarti tidak melihat desa dari sisi depan karena jika dari depan itu bukan mendorong kemajuan namun merampas dan menjatuhkan desa. Menuju desa komunikatif melalui KIM berarti membangun desa dari “belakang” dengan cara mengakselerasikan denyut nadi dan suasana kebatinan kultural-sosial desa, bukan dari cara pandang orang kota lagi.

Program dari pemerintah supra desa seperti KIM biasanya akan mengalami nasib dimana program tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal mengingat cara berpikir supra desa sulit dilaksanakan dengan cara masyarakat berpikir dan bertindak. Pemerintah supra desa jarang menggunakan cara berpikir masyarakat dimana program tersebut digulirkan. Belum lagi ketika ide-ide kemajuan tidak didukung oleh pembentukan kelembagaan secara kuat menjadikan banyak program ‘dari atas’ hanya sebatas sosialisasi dan kemudian berhenti. Sehingga posisi atau hakikat aspirasi warga terkait kepentingan lokal desa seharusnya menjadi unsur utama program pemberkuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isabandi Rukmito. 2002. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Seri Pemberdayaan Masyarakat, 02. FE UI, Jakarta
- Anwas, Oos M, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*”, Bandung, Perpustakaan Nasional
- Bustaman, Komir. 2000. *Pemberdayaan*, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Jakarta
- Dilla, Sumadi., 2007, *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media,
- Fujikake, Yoko, 2008, *Qualitative Evaluation: Evaluating People’s Empowerment*, Japanese, *Journal of Evaluation Studies*, Vol 8 No 2, 2008, pp 25 – 37, Japan Evaluation Society.
- Harun, Rochajat dan Ardianto, Elvinaro, 2011, *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*, Jakarta, Radjawali Pers
- Ife, Jim & Tesoriero, Frank, 2008, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, Jim, 2002, *Community Development : Community Based Alternatives in an Age of Globalisation*, Malaysia, Cath Godfrey
- McGinty, Sue, 2003, *The literature and theories behind community capacity building*, In: *Sharing Success: an Indigenous perspective*. VIC, Australia:Common Ground Publishing, pp. 65-93.
- Moleong, L.J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya., Bandung.
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Cetakan kedelapan. Bandung: Rosda.
- Nasution, S. 1998. *Metodologi Penelitian Naturalistik*. Bandung : Tarsito
- Prijono, Onny S, & A.M.W, Pranaka. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS Jakarta.
- Soekanto, Surjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama
- Sunartiningih, Agnes, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal*, Aditya Media, Yogyakarta, 2004
- Sutaryo, 2005. *Sosiologi Komunikasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Wilson, Terry, 1996, *The Empowerment Manual*, London: Grower Publishing Company.

SUMBER-SUMBER LAIN :

- UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menkomininfo No.7/PER/M.Kominfo/06/2010, tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media
- Peraturan Menkomininfo No.17/PER/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional
- Peraturan Menkomininfo RI No : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
- <http://kla.slemankab.go.id/>, diakses tanggal 12 Oktober 2019
- <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE/article/download/817/671/>.
- Diakses tanggal 5 Juli 2022
- <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/898/898>, Diakses tanggal 5 Juli 2022
- <http://ekonomi.upy.ac.id/ekonomi/files/PENANGGULANGAN%20KEMISKINAN%20MELALUI%20PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT%20PADA%20SEKTOR%20INDUSTRI%20GENTENG%20STUDI%20DI%20DESA%20MARGOLUWIH,%20KECAMATAN%20SEYEGAN,%20KA>

BUPATEN%20SLEMAN,%20PROPINSI%20DIY%20(Nany%20Noor%20Kurniyati%20UWMY).pdf. Diakses tanggal 24 September 2019